

KERAGAMAN ETNIS DI PAPUA: PEMETAAN KELOMPOK ETNIS UTAMA DAN URGENSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI PAPUA

Hapsari Rahma Yanti¹, Anzilni Uswatun Hasanah², Dian Miagia Ilyas³, Nadia Sampulawa⁴,
Dewi Nur Annisa⁵, Sulis Maryati⁶

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua, Indonesia

Rhyhapsari@gmail.com, Uswatunhasanahanzilni@gmail.com, Dianilyass03@gmail.com,
Harrisnadia316@gmail.com, Dnurannisa1807@gmail.com, Sulismaryati.papua@gmail.com

Abstrak

Papua yang merupakan wilayah di ujung timur Indonesia, memiliki keragaman budaya dan etnis dengan lebih dari 250 suku asli. Namun, terlepas dari keberagaman tersebut, pendidikan di Papua khususnya di wilayah pegunungan Papua masih menghadapi tantangan yang serius. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan BPS Papua, wilayah ini memiliki IPM yang rendah, angka partisipasi sekolah di bawah rata-rata nasional, dan sebanyak 314.606 anak putus sekolah. Faktor-faktor seperti akses geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur dan kurangnya tenaga pengajar berkontribusi terhadap kesenjangan ini. Oleh karena itu, pendidikan inklusif yang mempertimbangkan keragaman etnis dan budaya sangat penting untuk menjamin kesempatan belajar yang setara bagi semua anak. Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk memetakan kelompok etnis di Papua dan mengeksplorasi pentingnya pendidikan di wilayah tersebut. Melalui tinjauan literatur, penelitian ini memberikan wawasan mengenai defisit pendidikan di Papua dan pentingnya kebijakan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, khususnya di wilayah pegunungan Papua.

Kata kunci: Papua, kesenjangan Pendidikan, kelompok etnis, Pendidikan inklusif

Abstract

Papua located in the easternmost part of Indonesia, is home to a rich cultural and ethnic diversity with over 250 indigenous tribes. However, despite this diversity education in Papua, especially in the Papua Pegunungan region, still faces serious challenges. According to data from the Ministry of Education and Culture and BPS Papua, this region has a low Human Development Index (HDI), school participation rates below the national average, and approximately 314,606 children who have dropped out of school. Factors such as difficult geographical access, limited infrastructure, and a shortage of teachers contribute to this disparity. Therefore, inclusive education that takes into account ethnic and cultural diversity is essential to ensure equal learning opportunities for all children. This article uses the library research method to map ethnic groups in Papua and explore the importance of education in the region. Through a literature review, this study provides insights into the educational deficit in Papua and the importance of education policies tailored to local needs, particularly in the Papua Pegunungan region.

Keywords: Papua, educational disparity, ethnic groups, inclusive education

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No
234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](#)

PENDAHULUAN

Papua merupakan wilayah di ujung timur Indonesia. Didasari Undang-undang Peraturan Pemerintah Tahun 2022, Pulau Papua kini terdiri dari enam provinsi meliputi provinsi Papua,

Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Provinsi Papua sendiri memiliki keberagaman budaya dan etnis yang sangat kaya. Dikutip dari BPS Papua (2020), Provinsi Papua dihuni oleh lebih dari 250 suku asli yang tersebar di dataran tinggi, pesisir, dan daerah pedalaman. Setiap suku memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisi sendiri yang berbeda-beda. Suku-suku besar di Papua antara lain Suku Dani, Asmat, Amungme, Kamoro, dan Sentani, dengan keunikan masing-masing dalam bahasa, seni, serta sistem kepercayaan. Keragaman ini diperkuat dengan latar geografis Papua yang terisolasi oleh pegunungan, sungai, dan hutan lebat, sehingga memungkinkan tiap suku untuk mengembangkan identitas budaya yang unik.

Kebijakan pendidikan yang diterapkan secara seragam di tingkat nasional sering kali mengabaikan kebutuhan lokal, yang berakibat pada adanya kesenjangan pendidikan di daerah-daerah terpencil di Papua, seperti yang terjadi pada Papua Pegunungan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam Laporan Indeks Pembangunan Pendidikan (2022), Papua Pegunungan memiliki IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang rendah. Laporan ini juga menyoroti bahwa Papua memiliki angka partisipasi sekolah yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, terutama di kalangan masyarakat pedalaman. Kesenjangan yang terjadi pada Papua Pegunungan ini masih terjadi karena beberapa faktor kompleks yang saling berkaitan, seperti akses geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga pendidik, dan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan infrastruktur, sulitnya akses geografis, dan kurangnya tenaga pendidik di daerah-daerah terpencil. Selain itu, banyak anak-anak di wilayah Papua yang tidak bersekolah, dengan sekitar 314.606 anak yang putus sekolah tersebar di Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya (Kompas.id). Pendidikan di Papua juga harus memperhatikan keragaman budaya dan bahasa, mengingat lebih dari 250 suku asli yang ada di provinsi ini. Oleh karena itu, pendidikan inklusif yang mempertimbangkan keberagaman etnis dan budaya sangat diperlukan untuk memastikan semua anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar (BPS Papua, 2020). Kesenjangan pendidikan di Papua ini tidak hanya memengaruhi kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut, tetapi juga memperlebar jurang sosial dan ekonomi antara Papua dan daerah lainnya di Indonesia.

Pembahasan mengenai kesenjangan pendidikan di Papua Pegunungan memiliki urgensi tinggi karena memengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah tersebut. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan minimnya partisipasi sekolah menunjukkan bahwa hak pendidikan yang dijamin dalam UUD 1945 belum sepenuhnya terpenuhi. Ketimpangan ini tidak hanya mempertahankan lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan, tetapi juga memperlebar jurang sosial-ekonomi antara Papua Pegunungan dan daerah lainnya di Indonesia. Tantangan seperti sulitnya akses geografis, keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga pengajar, serta kondisi ekonomi masyarakat menjadi masalah utama yang harus segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendidikan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan lokal untuk mengurangi kesenjangan ini, sehingga masyarakat Papua Pegunungan dapat lebih setara dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Dikutip dari Kompas.id peneliti demografi Universitas Papua Agus Sumule mengatakan, sebanyak 314.606 anak yang tidak bersekolah tersebar di Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Dengan jumlah penduduk 95.380 jiwa, Papua Tengah menjadi daerah otonom baru dengan jumlah anak putus sekolah terbanyak dibandingkan tiga provinsi baru lainnya. Jumlah anak putus sekolah mencapai 95.022 di wilayah pegunungan Papua dan 92.988 di Papua bagian selatan. Jumlah anak putus sekolah di wilayah barat daya Papua kini berjumlah 31.216 jiwa. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah mengubah sistem

pendidikan. Hal ini karena masih banyak daerah terpencil yang pendidikannya terbatas, dan masyarakat perlu mengubah sikap mereka mengenai pentingnya pendidikan, terutama di daerah terpencil, agar pemerintah juga menyadari pentingnya pendidikan. Hal ini dalam posisi untuk mendorong perkembangan pendidikan.

Focus dalam artikel pembahasan ini mengenai Pemetaan kelompok Etnis di Papua dan Urgensi Pendidikan di Papua.

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan library research (penelitian kepustakaan) yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut: mengidentifikasi permasalahan dan pertanyaan penelitian terkait pemetaan kelompok etnis di Papua serta urgensi pendidikan multikultural. Mencari literatur relevan dari buku, artikel ilmiah, laporan, dan dokumen resmi menggunakan kata kunci seperti “keragaman etnis Papua” dan “pendidikan inklusif”. Menyeleksi sumber berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan dengan memprioritaskan literatur terbitan 10 tahun terakhir. Mencatat informasi penting seperti data statistik, pandangan ahli, dan teori yang relevan. Menganalisis dan menyintesis informasi untuk menemukan pola, hubungan, atau kesenjangan terkait pendidikan di Papua. Memvalidasi data dengan membandingkan berbagai sumber untuk memastikan akurasi, dan menyusun hasil analisis menjadi rekomendasi kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, terutama di wilayah pegunungan Papua.

HASIL KARYA DAN PEMBAHASAN

Papua merupakan wilayah yang sangat kaya akan keragaman etnis, budaya, dan bahasa. Terdapat lebih dari 250 kelompok etnis di Papua yang hidup dengan tradisi, adat istiadat, dan sistem sosial yang unik. Keberagaman ini menjadi tantangan tersendiri dalam membangun sebuah sistem pendidikan yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, memahami keragaman etnis Papua tidak hanya penting untuk menghargai kekayaan budaya lokal, tetapi juga menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Papua.

1. Pemahaman Keragaman Etnis di Papua

Keragaman etnis di Papua menciptakan tantangan unik dalam pelaksanaan pendidikan formal. Setiap kelompok etnis di Papua memiliki bahasa dan budaya sendiri yang sangat berbeda dari standar nasional pendidikan Indonesia, yang didasarkan pada bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Menurut Susilo (2018), kurangnya perhatian terhadap perbedaan bahasa dan budaya dalam sistem pendidikan menyebabkan banyak anak-anak Papua kesulitan dalam mengikuti pendidikan formal, yang berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi dan pencapaian Pendidikan. Pendidikan inklusif yang tidak memperhatikan faktor ini hanya akan memperlebar kesenjangan antara kelompok etnis di Papua dengan daerah lain di Indonesia.

Sebagai contoh, Suku Dani di dataran tinggi Baliem memiliki bahasa yang sangat berbeda dari bahasa Indonesia, dan tradisi mereka cenderung kuat dalam mempertahankan kearifan lokal. Alua (2017) menekankan bahwa sistem sosial suku Dani yang berbasis pada komunitas memengaruhi pandangan mereka terhadap pendidikan formal, yang kadang dianggap sebagai ancaman terhadap kelestarian budaya mereka. Hal ini menegaskan bahwa pemahaman tentang bagaimana kelompok etnis tertentu memandang pendidikan sangat penting dalam merancang program pendidikan inklusif yang efektif di Papua. Di antara lain beberapa aspek penting tentang Pendidikan di suku dani:

1. Sistem Pendidikan Tradisional:

- a. Pembelajaran berbasis pengalaman langsung
 - b. Diajarkan melalui tradisi lisan dan praktik sehari-hari
 - c. Fokus pada keterampilan bertahan hidup, bercocok tanam, dan nilai-nilai adat
2. Tantangan Pendidikan Formal:
- a. Kesenjangan akses ke sekolah formal
 - b. Kendala bahasa (bahasa pengantar vs bahasa daerah)
 - c. Perbedaan cara belajar antara sistem tradisional dan modern
 - d. Keterbatasan infrastruktur pendidikan
3. Perkembangan Modern:
- a. Mulai ada integrasi antara pendidikan tradisional dan formal
 - b. Program-program khusus yang mempertimbangkan kearifan lokal
 - c. Peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan formal

Perlu dipahami bahwa pendidikan di Suku Dani terus mengalami transformasi, dengan upaya untuk menyeimbangkan antara pelestarian budaya tradisional dan kebutuhan pendidikan modern.

2. Pentingnya Pendidikan Multikultural dalam Konteks Papua

BPS Papua (2021) Demografi dan Keragaman Etnis Papua: Tantangan dan Peluang, Badan Pusat Statistik Papua. Pendidikan multikultural sangat penting dalam konteks Papua, yang memiliki lebih dari 250 suku dan lebih dari 300 bahasa, menciptakan keragaman budaya yang sangat kaya. Dalam menghadapi keragaman etnis ini, pendidikan multikultural memainkan peran kunci dalam membangun toleransi dan saling pengertian antar kelompok masyarakat yang berbeda. Melalui pendidikan multikultural, anak-anak di Papua dapat belajar untuk menghargai perbedaan, baik dalam hal budaya, bahasa, maupun cara hidup, yang dapat mencegah terjadinya konflik sosial dan diskriminasi antar suku.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020) mengatakan bahwa pendidikan multikultural di Papua juga berperan dalam memperkaya wawasan global bagi generasi muda. Dengan mengenal dan menghargai keberagaman budaya yang ada, anak-anak Papua dapat memahami bahwa dunia ini penuh dengan berbagai tradisi dan cara hidup yang berbeda, dan bahwa perbedaan tersebut seharusnya menjadi kekuatan, bukan penghalang. Hal ini juga memberikan mereka kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Nugraha (2020) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural di Papua juga membantu menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, yang tidak hanya memperhatikan aspek akademis, tetapi juga menghargai identitas budaya setiap suku yang ada di Papua. Dalam praktiknya, kurikulum yang berbasis multikultural dapat menyertakan pelajaran tentang sejarah, adat istiadat, dan bahasa lokal yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Papua, sehingga siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar lebih giat. Pendidikan semacam ini juga dapat mengurangi ketimpangan pendidikan yang masih terjadi, terutama di daerah terpencil, dengan memastikan bahwa semua anak, terlepas dari latar belakang etnis dan suku mereka, mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan yang bermutu.

Dengan demikian, pendidikan multikultural tidak hanya memberikan dampak positif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan di Papua. Untuk itu, penting bagi pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan untuk bekerja sama dalam mengembangkan dan menerapkan model pendidikan yang menghargai keberagaman, guna mewujudkan Papua yang lebih inklusif, maju, dan sejahtera.

3. Pendidikan Inklusif sebagai Solusi untuk Ketimpangan Akses Pendidikan

Pendidikan inklusif merupakan upaya untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang berasal dari kelompok minoritas etnis dan budaya, mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan. Di Papua, tantangan terbesar dalam pelaksanaan pendidikan inklusif terletak pada ketidakmerataan infrastruktur pendidikan serta kurangnya tenaga pendidik yang memahami konteks sosial-budaya lokal. Banyak daerah di Papua, terutama di wilayah pedalaman seperti suku Amungme dan Asmat, tidak memiliki akses yang memadai ke fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar yang berkualitas.

UNESCO (2015) menekankan bahwa pendidikan inklusif harus mencakup pendekatan yang berpusat pada anak dengan memperhatikan kebutuhan dan latar belakang budaya mereka. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya pelatihan khusus bagi guru-guru di Papua agar mereka dapat memahami keragaman budaya dan bahasa yang ada. BPS (2022) mencatat bahwa kurangnya guru yang memahami konteks lokal menyebabkan angka putus sekolah di Papua lebih tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Pendidikan inklusif juga menuntut pemerintah untuk berinvestasi lebih besar dalam infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil Papua. Banyak sekolah di Papua tidak memiliki fasilitas dasar, seperti listrik, akses internet, dan buku pelajaran yang memadai. Hal ini membuat siswa di daerah terpencil mengalami kesenjangan besar dalam hal kualitas pendidikan dibandingkan dengan siswa di wilayah perkotaan. Rahab (2020) menyatakan bahwa tanpa infrastruktur yang memadai, pendidikan inklusif di Papua sulit dicapai karena banyak anak-anak yang tidak bisa mengakses sekolah secara konsisten. Pendidikan Inklusif dan Tantangan Implementasinya dalam Mengatasi Ketimpangan Akses Pendidikan

Meskipun pendidikan inklusif diyakini sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan, implementasinya menghadapi berbagai tantangan signifikan. Pemahaman mendalam tentang tantangan-tantangan ini penting untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas.

SIMPULAN

Keragaman etnis di Papua, seperti Suku Dani, menghadirkan tantangan bagi pendidikan inklusif, terutama terkait bahasa, budaya, dan akses. Pendidikan formal sering bertentangan dengan tradisi lokal, yang berfokus pada nilai adat dan pembelajaran langsung. Solusinya adalah mengintegrasikan kearifan lokal dengan pendidikan modern melalui program yang memperhatikan budaya setempat.

Pendidikan multikultural di Papua sangat penting untuk membangun toleransi, menghargai perbedaan budaya, bahasa, dan cara hidup antar suku. Dengan lebih dari 250 suku dan 300 bahasa, pendidikan ini membantu anak-anak Papua menghindari konflik sosial dan diskriminasi. Pendidikan multikultural juga memperkaya wawasan global generasi muda dan menciptakan sistem pendidikan inklusif yang menghargai identitas budaya lokal, mengurangi ketimpangan pendidikan, dan memastikan akses pendidikan yang adil. Oleh karena itu, pendidikan multikultural berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera di Papua.

Pendidikan inklusif di Papua menghadapi tantangan besar, seperti minimnya infrastruktur, kurangnya guru yang memahami budaya lokal, dan terbatasnya fasilitas di daerah terpencil. Pendekatan berpusat pada anak, pelatihan guru, dan investasi infrastruktur diperlukan untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan dan mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas.

REFERENSI

- Rakhmawati, L. (2021). Keragaman Etnis di Papua: Pemetaan dan Implikasinya dalam Pendidikan (hlm. 45-67). Jakarta: Penerbit Universitas Negeri Jakarta.
- Widiastuti, N. (2020). Pendidikan Inklusif di Papua: Tantangan dan Peluang (hlm. 112-130). Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Kurniawan, A. (2019). Kebudayaan Papua dan Pendidikan Multikultural (hlm. 98-115). Bandung: Penerbit Universitas Pendidikan Indonesia.
- Alua, A. (2017). Pemetaan Sosial Budaya Papua: Sebuah Pendekatan Terpadu. Yogyakarta: Kanisius. Halaman 45-78.
- BPS. (2022). Indeks Pembangunan Manusia Papua Tahun 2022. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Halaman 12-15.
- Susilo, S. (2018). Pendidikan Inklusif dan Keberagaman Etnis di Papua. Jakarta: Pustaka Alam. Halaman 90-120.
- Rahab, A. (2020). Papua dalam Cengkeraman Konflik dan Potensi Perdamaian. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Halaman 110-145.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Indeks Pembangunan Manusia Papua Tahun 2022. Jakarta: BPS. Halaman 12-50.
- Maharani, R. (2022). Transformasi Digital dalam Pendidikan di Papua: Keterampilan dan Strategi. Yogyakarta: Penerbit Andi. Halaman 110-130.
- Slamet, B. (2019). Pendidikan Karakter: Membangun Generasi yang Toleran dan Inklusif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Halaman 140-160.
- Astuti, L. (2021). Budaya Lokal dalam Pendidikan: Pendekatan Berbasis Kearifan Lokal. Jakarta: Gramedia. Halaman 90-110.
- Yanti, S. (2024). Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak: Studi Kasus di Papua. Malang: UMM Press. Halaman 30-50.
- Setiawan, I. (2022). Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peluang dan Tantangan. Jakarta: Pustaka Media. Halaman 60-80.
- Susilo, D. (2018). Pendidikan di Papua: Tantangan dan Peluang dalam Konteks Keragaman Budaya. Jakarta: Pustaka Pembangunan.
- Rahab, S. (2020). Pendidikan Inklusif di Daerah Terpencil: Solusi untuk Papua. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- BPS Papua (2021) Demografi dan Keragaman Etnis Papua: Tantangan dan Peluang, Badan Pusat Statistik Papua.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Pendidikan untuk Keberagaman: Membangun Integrasi Sosial di Papua. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Nugraha (2020). Pendidikan Multikultural dan Pembangunan Karakter Toleransi.